

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

UKM merupakan sektor vital dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang karena perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Peran penting UKM terutama di Indonesia telah dibuktikan ketika Indonesia dihadapkan pada krisis moneter UKM lah yang dijadikan katup pengaman perekonomian dengan kinerja yang cenderung relatif resisten terhadap guncangan ekonomi. Hal ini kembali ditegaskan oleh Hill (2001), yang menyatakan bahwa UKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena : pertama, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Kedua, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UKM. Tiga, potensi kontribusi UKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. Keempat, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik UKM. Lima, harapan atas kontribusi UKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. Keenam, UKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 menunjukkan UKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit, UKM terbukti berkontribusi sebesar

56,92% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25 Triliun. Selain itu, UKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia (BPS, 2009). Hal serupa dinyatakan juga dalam salah satu publikasi Asian Development Bank (2001) mengatakan bahwa peran UKM penting bagi restrukturisasi industri, karena UKM memberikan kontribusi bagi pertumbuhan lapangan kerja dalam kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar, dan dalam jangka panjang UKM dapat menyediakan porsi yang signifikan bagi lapangan kerja secara keseluruhan. Tambunan (2002) juga menyatakan bahwa UKM di Indonesia memberikan kontribusi bagi kesempatan kerja untuk masyarakat, dan meningkatkan PDB, dimana Tambunan menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar dan perusahaan besar yang sedikit, maka kesempatan kerja yang ada juga sedikit dimana perusahaan-perusahaan besar tidak dapat menampung semua angkatan kerja yang ada, dan angkatan kerja ini terserap oleh UKM..

Pada prakteknya, pengembangan UKM di berbagai negara terbentur oleh beberapa hambatan. Publikasi World Bank (2007) menyatakan bahwa modal merupakan salah satu aspek yang paling penting bagi perusahaan. Sedangkan Hayashi (2002) menyatakan bahwa UKM terutama di Indonesia memiliki 4 permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangannya. Keempat permasalahan tersebut adalah: pertama, kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi dan pengendalian mutu, kedua, kurangnya kemampuan pemasaran, ketiga, kurangnya pengetahuan manajemen dan terakhir, kurangnya akses ke

pendanaan secara formal. Apabila perusahaan mengalami hambatan dalam masalah finansial, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan untuk tumbuh, tidak terkecuali UKM. Salah satu bukti empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Maksimovic (2005). Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hambatan dalam modal memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami pertumbuhan output yang lebih lambat. Secara agregat, akses modal yang lebih luas dapat mempercepat perekonomian suatu negara.

Untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, UKM menghadapi kondisi dimana mereka didorong untuk lebih proaktif dalam mencari dan memperoleh sumber pendanaan yang paling efektif. Banyak UKM yang dimulai dengan ide dari satu atau dua orang, yang menginvestasikan uang mereka sendiri atau mungkin menggunakan bantuan finansial dari orang-orang terdekat mereka, hal ini dilakukan karena dana yang didapatkan dengan cara ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke badan penyedia kredit seperti bank. Namun, ketika UKM tersebut mulai meraih keberhasilan dan mulai berkembang, UKM akan membutuhkan investasi baru dalam jumlah yang lebih besar untuk inovasi ataupun pengembangan usaha lebih lanjut, dan pada tahap ini, pendanaan eksternal menjadi satu-satunya pilihan. Hal ini sejalan dengan teori *pecking order* yang didasarkan pada temuan dari Myers & Majluf dalam Murhadi (2012) bahwa perusahaan memiliki preferensi dalam memilih sumber pendanaannya. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal daripada eksternal dalam rangka membiayai pengembangan

usahanya. Bila sumber pendanaan internal yang berasal dari *financial slack* tidak mencukupi, maka barulah dipergunakan sumber pendanaan eksternal. Pada saat itulah UKM menghadapi masalah, karena jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar, UKM akan lebih sulit memperoleh modal dari bank ataupun pemberi pinjaman lain. Hal ini didukung dengan kesimpulan yang dihasilkan pada *European Central Bank Consultation* (2011) yang menyatakan bahwa akses modal berada di urutan kedua sebagai masalah yang paling memberikan tekanan terhadap UKM di Eropa. Bahkan hasil *Survey World Business Enterprise Survey* (WBES) yang dilaksanakan di 135 negara dan mencakup hingga 130.000 perusahaan di 6 sub-region menempatkan akses modal sebagai masalah hambatan ekonomi terbesar dengan angka 16,9%, mengalahkan isu-isu lain seperti korupsi, ketidak-stabilan politik dan transportasi. Hal yang hampir serupa juga disimpulkan dari *Public Consultation on the effectiveness of innovation support in Europe* (2011), bahwa kurangnya akses modal merupakan faktor utama penghambat aktivitas inovasi dan pengenalan inovasi ke pasar.

Hambatan atas modal pun terbagi atas dua, dari sisi penawaran, terlalu banyak UKM yang meminta akses modal sedangkan pihak kreditor tidak dapat memenuhi keseluruhan modal, juga proses pemberian kredit yang kompleks bisa menyebabkan sulitnya mendapatkan modal (*RAM Consultancy*, 2005), selain itu, tingkat suku bunga yang tinggi juga semakin mempeprburuk keadaan ini. Dari sisi permintaan, kurangnya dokumentasi mengenai data historis UKM dan keterbatasan aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan ketika mengajukan pinjaman. Hal ini memicu besarnya *asymmetric information* antara UKM dengan

lembaga yang berniat memberikan pinjaman. Dalam penelitian yang dilakukan Ali (2008) menyatakan bahwa keengganan bank dalam memberikan kredit terhadap UKM terutama disebabkan oleh keterbatasan aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan, ketidakpastian bisnis di masa depan, lemahnya manajemen keuangan, dan kurangnya track record.

Ukuran perusahaan berpengaruh dalam akses kemudahan mendapatkan modal. Hambatan bagi perusahaan skala kecil untuk mendapatkan modal bagi perusahaannya biasanya karena banyak dari perusahaan skala kecil yang tidak memiliki atau menyediakan informasi keuangan. Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan skala kecil. Perusahaan skala kecil juga memiliki nilai aset yang lebih kecil daripada perusahaan dengan skala lebih besar sehingga aset yang dimilikinya tidak cukup sebagai jaminan (Klapper et al, 2002) untuk mendapatkan akses modal. Hal lain yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemungkinan gagal yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala usaha lebih besar

Selain kedua karakteristik diatas, konsentrasi kepemilikan perusahaan juga dapat mempengaruhi akses modal UKM. Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki potensi dimana pemilik saham dominan perusahaan dapat memperburuk asimetri informasi yang menyebabkan semakin terbatasnya akses perusahaan terhadap modal. Hal ini disebabkan karena sang pemilik saham dominan dianggap akan menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri.

Karakteristik lain yang dapat mempengaruhi akses modal adalah sektor bisnis dimana UKM beroperasi, karena sektor bisnis merepresentasikan resiko yang harus dihadapi oleh UKM. Hal ini telah dikemukakan oleh Punyasavatsut (2011), yang menyatakan bahwa perusahaan manufaktur dianggap memiliki resiko yang lebih rendah, memiliki rasio hutang terhadap modal yang lebih tinggi dibandingkan sektor bisnis lain. Sektor bisnis juga menentukan jumlah aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan, sebagai contoh, perusahaan manufaktur memiliki jumlah aset berwujud yang lebih besar dibanding perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, sehingga perusahaan manufaktur memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan dari pihak eksternal. Selain itu, sektor bisnis juga mempengaruhi jumlah dana yang dibutuhkan oleh UKM, dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan kreditor untuk menyediakan dana yang dibutuhkan tersebut atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akses modal UKM. Penelitian ini diberi judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KONSENTRASI KEPEMILIKAN DAN SEKTOR BISNIS TERHADAP AKSES MODAL UKM”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap akses modal UKM?
2. apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap akses modal UKM?
3. apakah sektor berpengaruh terhadap akses modal UKM?
4. apakah ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan sektor bisnis secara bersama-sama berpengaruh terhadap akses modal UKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan dan sektor bisnis terhadap akses modal UKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, pengusaha UKM dan akademisi serta pihak lain yang berkepentingan. Dengan mengetahui pengaruh penggunaan ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan sektor bisnis terhadap akses modal UKM di Indonesia maka diharapkan:

- a. Manfaat Teoritis :

Dapat membuktikan secara empiris dan memperkaya konsep atau teori khususnya yang terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan sektor bisnis terhadap akses modal UKM.

b. Manfaat Praktis :

Bagi pengusaha UKM, penelitian ini dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi pihak pengusaha untuk menentukan kebijaksanaan dalam memulai dan mengembangkan usahanya.